



**SALINAN**

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA  
BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut DBH Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Murung Raya.

**BAB II**  
**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Besaran dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan perkiraan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (3) Bagi hasil pajak dan retribusi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

**BAB III**  
**PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 3**

Rincian DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar; dan
- b. Alokasi Formula.

**Pasal 4**

- (1) Pengalokasian DBH Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan :
  - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa sebagai alokasi dasar;
  - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi tahun sebelumnya dari masing-masing desa sebagai alokasi formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus :

$$D = \text{PRT.1} \times I$$

Dimana :

$$\text{PRT.1} = \text{PRT.2} \times R$$

$$I = \frac{\text{TPRT.1}}{\text{TPRT.2}}$$

Keterangan :

D = DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Berjalan.

PRT.1 = Pagu sesuai Realisasi Tahun Sebelumnya.

PRT.2 = Pagu dasar per Desa Tahun Berjalan.

I = Index kenaikan persentase.

R = Persentase realisasi per Desa Tahun Sebelumnya.

TPRT.1 = Total Pagu sesuai realisasi Tahun Sebelumnya.

TPRT.2 = Total Pagu Dasar Per Desa Tahun Berjalan.

- (3) Besarnya DBH Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditentukan atas dasar realisasi sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.
- (4) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Total Alokasi DBH Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar **Rp. 1.564.510.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**.
- (2) Hasil perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 6**

Kertas kerja perhitungan DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa di Kabupaten Murung Raya, dibuat setiap tahun dalam bentuk format yang disepakati dan diketahui oleh Kepala BAPENDA, Kepala BPKAD dan Kepala DPMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN DBH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Bagian Pertama Mekanisme Penyaluran Dana**

### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dianggarkan pada BPKAD.

- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui DPMD dan Camat setelah dilakukan verifikasi administrasi oleh Sekretaris Desa, dengan dilampirkan persyaratan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain :
  - a. Surat Pengantar Kepala Desa;
  - b. Perdes APBDes murni/perubahan sesuai tahun berjalan;
  - c. Rencana Penggunaan Dana DBH Pajak dan Retribusi;
  - d. Realisasi Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya;
  - e. Syarat lainnya yang ditetapkan melalui surat edaran Sekretaris Daerah tentang mekanisme penyaluran DBH Pajak dan Retribusi tahun berjalan.
- (5) Untuk mencairkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa /Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan tahun berjalan.
- (6) Atas dasar permohonan Kepala Desa dan rekomendasi Camat, selanjutnya DPMD melakukan register berkas dan berkas permohonan beserta dokumen persyaratannya disampaikan kepada BPKAD.
- (7) Kepala BPKAD Kabupaten melalui Bendahara Pengeluaran akan menyalurkan DBH Pajak dan Retribusi Daerah langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dalam 1 (satu) Tahap.
- (8) Pemerintah desa menyampaikan permohonan pencairan DBH pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan selama tahun berjalan, dengan ditetapkan lebih lanjut melalui surat edaran Sekretaris Daerah.
- (9) Mekanisme penatausahaan keuangan dan penyaluran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah**

**Pasal 8**

Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk :

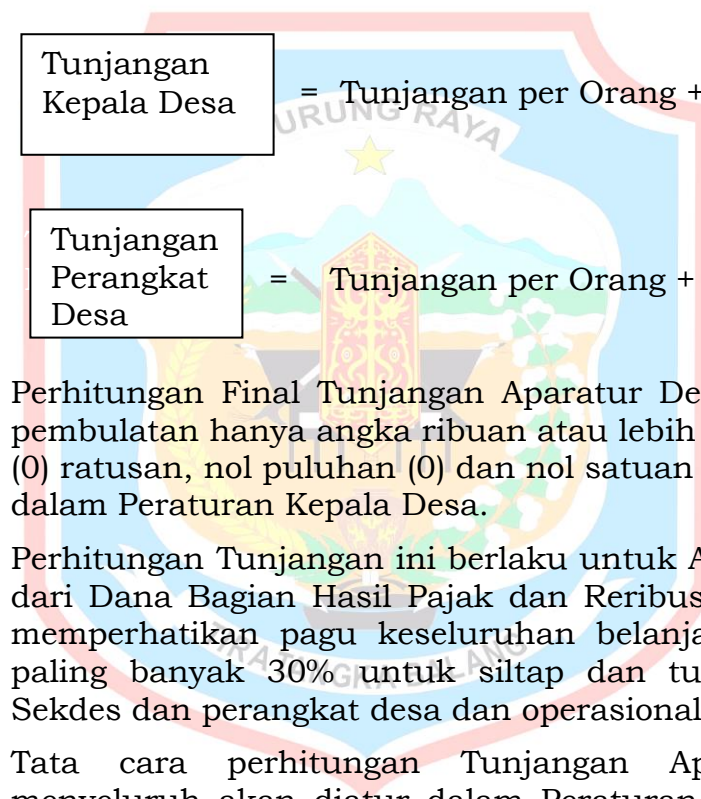
- a. Tunjangan kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya.

## Pasal 9

- (1) Tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dihitung dengan ketentuan sebesar 40% (Empat puluh per seratus) dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh desa.
- (2) Total Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata kepada Kepala Desa dan perangkatnya.
- (3) Perhitungan tunjangan dihitung dengan rumus :

Total Tunjangan Aparat Desa = DBH per Desa X 40%

$$\text{Tunjangan per orang/ bulan} = \frac{\text{Total Tunjangan Aparat Desa} / 12 \text{ bulan}}{\text{Jumlah Aparat Desa}}$$


$$\text{Tunjangan Kepala Desa} = \text{Tunjangan per Orang} + \text{Rp. 5.000,- / bulan}$$

$$\text{Tunjangan Perangkat Desa} = \text{Tunjangan per Orang} + \text{Rp. 1.000,- / bulan}$$

- (4) Perhitungan Final Tunjangan Aparatur Desa perbulan dilakukan pembulatan hanya angka ribuan atau lebih tanpa nilai angka / nol (0) ratusan, nol puluhan (0) dan nol satuan (0) rupiah, agar dimuat dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Perhitungan Tunjangan ini berlaku untuk Alokasi yang bersumber dari Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan tetap memperhatikan pagu keseluruhan belanja Desa dalam APBDes paling banyak 30% untuk siltap dan tunjangan Kepala Desa, Sekdes dan perangkat desa dan operasional BPD.
- (6) Tata cara perhitungan Tunjangan Aparatur Desa secara menyeluruh akan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Format Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 10

Pengadaan barang dan/ atau jasa di Desa yang sumber pembiayaannya dari DBH Pajak dan Retribusi Daerah mengikuti pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di Desa yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaporan Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Desa harus melaporkan kepada Bupati perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah yang paling sedikit memuat :
  - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
  - b. Masalah yang dihadapi; dan
  - c. Hasil akhir penggunaan Dana.
- (2) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari pelaksana di tingkat desa diketahui kepala desa ke Camat secara bertahap dan Camat membuat laporan dengan merekap seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya kemudian melaporkan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersedia di kantor Kepala Desa sehingga dapat diakses oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan.
- (4) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bupati dapat melakukan penundaan penyaluran DBH Pajak dan Retribusi Daerah.

**Bagian Keempat**  
**Pengawasan Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah**

**Pasal 12**

- (1) Pengawasan terhadap Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan melalui :
  - a. Pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Desa;
  - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten; dan
  - c. Pengawasan struktural dilakukan oleh Camat dan BPKAD.
- (2) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 13**

- (1) Penggunaan DBH Pajak dan Retribusi Daerah tidak diperkenankan untuk menutup/membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan masyarakat oleh Pemerintah Desa.



- (2) Bagi yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, setiap Desa yang menerima DBH Pajak dan Retribusi Daerah wajib mencantumkan dalam APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan dalam tahun berjalan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 7 Desember 2021

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 7 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**HERMON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 55.**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA**  
**NOMOR 55 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA**  
**BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

**PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)
1	2	3	4	5	6=4+5
1	MURUNG	1 DIRUNG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		2 MALASAN	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		3 BATU PUTIH	30,666,000	2,264,000	32,930,000
		4 MANGKAHUI	42,550,000	2,264,000	44,814,000
		5 PANUUT	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		6 MUARA UNTU	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		7 MUARA JAAN	8,844,000	2,264,000	11,108,000
		8 BAHITOM	95,530,000	2,264,000	97,794,000
		9 DANAU USUNG	24,784,000	2,264,000	27,048,000
		10 JUKING PAJANG	29,717,000	2,264,000	31,981,000
		11 MUARA SUMPOI	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		12 MUARA BUMBAN	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		13 PENYANG	9,382,000	2,264,000	11,646,000
			JUMLAH I	<b>281,871,000</b>	<b>29,432,000</b>
2	TANAH SIANG	1 KONUT	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		2 TINO TALIH	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		3 OSOM TOMPOK	10,706,000	2,264,000	12,970,000
		4 BELAWAN	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		5 OLUNG SOLOI	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		6 SUNGAI LUNUK	24,853,000	2,264,000	27,117,000
		7 MUWUN	11,454,000	2,264,000	13,718,000
		8 CANGKANG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		9 PURUK BATU	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		10 KALANG KALUH	10,565,000	2,264,000	12,829,000
		11 TABULANG	19,732,000	2,264,000	21,996,000
		12 KARALI	6,791,000	2,264,000	9,055,000
		13 OLUNG ULU	12,471,000	2,264,000	14,735,000
		14 OLUNG DOJOU	10,414,000	2,264,000	12,678,000
		15 DOAN ARUNG	14,287,000	2,264,000	16,551,000
		16 MAHANYAN	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		17 SERUHUNG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		18 OLUNG SIRON	9,902,000	2,264,000	12,166,000
		19 TOKUNG	7,061,000	2,264,000	9,325,000
		20 DIRUNG BAKUNG	18,950,000	2,264,000	21,214,000
		21 OLUNG NANGO	12,642,000	2,264,000	14,906,000
		22 MANTIAT PARI	21,134,000	2,264,000	23,398,000
		23 KOLAM	12,298,000	2,264,000	14,562,000
		24 NONO KLIWON	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		25 OLUNG BALO	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		26 MANGKOLISOI	17,236,000	2,264,000	19,500,000
	JUMLAH II	<b>287,826,000</b>	<b>58,864,000</b>	<b>346,690,000</b>	
3	TANAH SIANG SELATAN	1 ORENG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		2 OLUNG MURO	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		3 OLUNG HANANGAN	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		4 DIRUNG LINGKIN	11,470,000	2,264,000	13,734,000
		5 DATAH KOTOU	7,081,000	2,264,000	9,345,000
		6 TAHUJAN ONTU	11,478,000	2,264,000	13,742,000
		7 PURUK KAMBANG	10,152,000	2,264,000	12,416,000
			JUMLAH III	<b>60,380,000</b>	<b>15,848,000</b>

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK	RETRIBUSI DAERAH	BESARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6=4+5	
<b>4</b>	<b>BARITO TUHUP RAYA</b>	1	BUMBAN TUHUP	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		2	MAKUNJUNG	18,414,000	2,264,000	20,678,000
		3	DIRUNG SARARONG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		4	KOHONG	16,004,000	2,264,000	18,268,000
		5	HINGAN TOKUNG	10,554,000	2,264,000	12,818,000
		6	LIANG NYALING	7,960,000	2,264,000	10,224,000
		7	TUMBANG BAUH	12,238,000	2,264,000	14,502,000
		8	TUMBANG MASALO	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		9	BATU TOJAH	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		10	TUMBANG BALOI	15,503,000	2,264,000	17,767,000
		11	CINTA BUDIMAN	8,689,000	2,264,000	10,953,000
		JUMLAH IV			<b>116,294,000</b>	<b>24,904,000</b>
<b>5</b>	<b>LAUNG TUHUP</b>	1	BATU TUHUP	26,257,000	2,264,000	28,521,000
		2	TUMBANG BAHAN	8,571,000	2,264,000	10,835,000
		3	MUARA LAUNG II	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		4	BERAS BELANGE	12,932,000	2,264,000	15,196,000
		5	PELACI	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		6	BIHA	8,992,000	2,264,000	11,256,000
		7	DIRUNG PUNDU	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		8	DIRUNG PINANG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		9	MUARA TUPUH	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		10	NARUI	9,029,000	2,264,000	11,293,000
		11	TUMBANG BANA	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		12	LAKUTAN	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		13	TAWAI HAUI	9,490,000	2,264,000	11,754,000
		14	PENDA SIRON	16,872,000	2,264,000	19,136,000
		15	MUARA MARUEI I	24,321,000	2,264,000	26,585,000
		16	MUARA MARUEI II	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		17	BERALANG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		18	KALANG DUHUNG	8,438,000	2,264,000	10,702,000
		19	BATU BUA II	9,241,000	2,264,000	11,505,000
		20	TAHUJAN LAUNG	10,023,000	2,264,000	12,287,000
		21	TUMBANG BONDANG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		22	TUMBANG TONDUK	8,330,000	2,264,000	10,594,000
		23	BATU KARANG	8,718,000	2,264,000	10,982,000
		JUMLAH V			<b>228,544,000</b>	<b>52,072,000</b>
<b>6</b>	<b>PERMATA INTAN</b>	1	SUNGAI GULA	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		2	SUNGAI BATANG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		3	TUMBANG SALIO	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		4	PURNAMA	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		5	SUNGAI LOBANG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		6	PANTAI LAGA	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		7	BARATU	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		8	JUKING SOPAN	15,736,000	2,264,000	18,000,000
		9	MUARA BABUAT	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		10	SEI BAKANON	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		JUMLAH VI			<b>76,333,000</b>	<b>22,640,000</b>
<b>7</b>	<b>SUNGAI BABUAT</b>	1	BATU MIRAU	16,967,000	2,264,000	19,231,000
		2	TAMBELUM	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		3	TUMBANG BANTIAN	17,911,000	2,264,000	20,175,000
		4	TUMBANG SAAN	10,582,000	2,264,000	12,846,000
		5	TUMBANG KOLON	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		6	TUMBANG APAT	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		JUMLAH VII			<b>65,659,000</b>	<b>13,584,000</b>

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>	<b>PAJAK</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>BESARAN (RP)</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=4+5</b>	
<b>8</b>	<b>SUMBER BARITO</b>	1	KALAPEH BARU	8,276,000	2,264,000	10,540,000
		2	TUMBANG MASAO	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		3	BATU MAKAP	11,783,000	2,264,000	14,047,000
		4	OLONG LIKO	10,613,000	2,264,000	12,877,000
		5	TELOK JOLO	10,053,000	2,264,000	12,317,000
		6	LAAS BARU	16,958,000	2,264,000	19,222,000
		7	TUMBANG MOLUT	7,896,000	2,264,000	10,160,000
		8	TUMBANG TUAN	6,733,000	2,264,000	8,997,000
			JUMLAH VIII	<b>79,045,000</b>	<b>18,112,000</b>	<b>97,157,000</b>
<b>9</b>	<b>SERIBU RIAM</b>	1	TUMBANG TOHAN	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		2	TUMBANG NAAN	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		3	MUARA JOLOI I	16,087,000	2,264,000	18,351,000
		4	MUARA JOLOI II	12,523,000	2,264,000	14,787,000
		5	PARAHAU	8,238,000	2,264,000	10,502,000
		6	TUMBANG JOJANG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		7	TAKAJUNG	8,673,000	2,264,000	10,937,000
			JUMLAH IX	<b>65,720,000</b>	<b>15,848,000</b>	<b>81,568,000</b>
<b>10</b>	<b>U'UT MURUNG</b>	1	TUMBANG TUJANG	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		2	TUMBANG OLONG	10,833,000	2,264,000	13,097,000
		3	KALASIN	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		4	TUMBANG TOPUS	8,463,000	2,270,000	10,733,000
		5	TUMBANG OLONG II	7,446,000	2,264,000	9,710,000
			JUMLAH X	<b>40,208,000</b>	<b>11,326,000</b>	<b>51,534,000</b>
<b>TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X</b>			<b>1,301,880,000</b>	<b>262,630,000</b>	<b>1,564,510,000</b>	

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE M. YOSEPH**





No.	KEC / DESA	DESA	KETETAPAN GLOBAL	TAGIHAN MURNI DESA	TERBAYAR	SISA	TOTAL TAGIHAN MURNI DESA	pagu dasar per desa 2021	% REALISASI PER DESA 2020	% DASAR PER DESA	TOTAL 40% BHP 2021	pagu sesuai realisasi 2020	INDEX	PENDAPATAN DESA DARI 40% BHP 2021	PEMBULATAN BHP 40%	PENDAPATAN DARI 60% BHP 2021	TOTAL BHP 2021	RETRIBUSI 2021	TOTAL	
		Muara Babuat	3,577,535	3,577,535	-	3,577,535	416,962,583	4,468,905	0.00%	0.86%	520,852,000	-	3.089573	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000	
		Sungai Bakanon	6,649,562	6,649,562	-	6,649,562	416,962,583	8,306,351	0.00%	1.59%	520,852,000	-	3.089573	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000	
7	SUNGAI BABUAT	Batu Mirau	2,651,821	2,651,821	2,651,821	-	416,962,583	3,312,542	100%	0.64%	520,852,000	3,312,542	3.089573	10,234,341	10,234,000	6,733,000	16,967,000	2,264,000	19,231,000	
		Tambelum	2,872,670	2,872,670	-	2,872,670	416,962,583	3,588,418	0.00%	0.69%	520,852,000	-	3.089573	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000	
		Tumbang Bantian	3,555,382	2,896,582	2,896,582	-	416,962,583	3,618,288	100%	0.69%	520,852,000	3,618,288	3.089573	11,178,963	11,178,000	6,733,000	17,911,000	2,264,000	20,175,000	
		Tumbang Saan	997,454	997,454	997,454	-	416,962,583	1,245,977	100%	0.24%	520,852,000	1,245,977	3.089573	3,849,537	3,849,000	6,733,000	10,582,000	2,264,000	12,846,000	
		Tumbang Kolon	505,202	505,202	-	505,202	416,962,583	631,077	0.00%	0.12%	520,852,000	-	3.089573	-	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000
		Tumbang Apat	2,827,932	2,827,932	-	2,827,932	416,962,583	3,532,533	0.00%	0.68%	520,852,000	-	3.089573	-	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000
8	SUMBER BARITO	Kalapeh Baru	400,000	400,000	400,000	-	416,962,583	499,663	100%	0.10%	520,852,000	499,663	3.089573	1,543,745	1,543,000	6,733,000	8,276,000	2,264,000	10,540,000	
		Tumbang Masao	6,938,357	979,557	-	979,557	416,962,583	1,223,621	0.00%	0.23%	520,852,000	-	3.089573	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000	
		Batu Makap	1,308,722	1,308,722	1,308,722	-	416,962,583	1,634,800	100%	0.31%	520,852,000	1,634,800	3.089573	5,050,834	5,050,000	6,733,000	11,783,000	2,264,000	14,047,000	
		Olong Liko	1,005,400	1,005,400	1,005,400	-	416,962,583	1,255,903	100%	0.24%	520,852,000	1,255,903	3.089573	3,880,204	3,880,000	6,733,000	10,613,000	2,264,000	12,877,000	
		Teluk Jolo	909,034	860,254	860,254	-	416,962,583	1,074,593	100%	0.21%	520,852,000	1,074,593	3.089573	3,320,033	3,320,000	6,733,000	10,053,000	2,264,000	12,317,000	
		Laas Baru	2,649,600	2,649,600	2,649,600	-	416,962,583	3,309,768	100%	0.64%	520,852,000	3,309,768	3.089573	10,225,769	10,225,000	6,733,000	16,958,000	2,264,000	19,222,000	
		Tumbang Molut	301,465	301,465	301,465	-	416,962,583	376,577	100%	0.07%	520,852,000	376,577	3.089573	1,163,463	1,163,000	6,733,000	7,896,000	2,264,000	10,160,000	
		Tumbang Tuan	229,635	229,635	-	229,635	416,962,583	286,850	0.00%	0.06%	520,852,000	-	3.089573	-	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000
9	SERIBU RIAM	Tumbang Tohan	591,153	591,153	-	591,153	416,962,583	738,443	0.00%	0.14%	520,852,000	-	3.089573	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000	
		Tumbang Naan	1,401,631	1,401,631	-	1,401,631	416,962,583	1,750,858	0.00%	0.34%	520,852,000	-	3.089573	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000	
		Muara Joloi I	16,201,659	2,423,801	2,423,801	-	416,962,583	3,027,710	100%	0.58%	520,852,000	3,027,710	3.089573	9,354,329	9,354,000	6,733,000	16,087,000	2,264,000	18,351,000	
		Muara Joloi II	2,133,558	2,133,558	1,500,253	633,305	416,962,583	2,665,150	70.32%	0.51%	520,852,000	1,874,053	3.089573	5,790,022	5,790,000	6,733,000	12,523,000	2,264,000	14,787,000	
		Parahau	390,000	390,000	390,000	-	416,962,583	487,171	100%	0.09%	520,852,000	487,171	3.089573	1,505,152	1,505,000	6,733,000	8,238,000	2,264,000	10,502,000	
		Tumbang Jojang	690,818	690,818	-	690,818	416,962,583	862,941	0.00%	0.17%	520,852,000	-	3.089573	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000	
		Takajung	502,842	502,842	502,842	-	416,962,583	628,129	100%	0.12%	520,852,000	628,129	3.089573	1,940,650	1,940,000	6,733,000	8,673,000	2,264,000	10,937,000	
10	U'UT MURUNG	Tumbang Tujang	1,079,368	1,079,368	-	1,079,368	416,962,583	1,348,301	0.00%	0.26%	520,852,000	-	3.089573	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000	
		Tumbang Olong I	8,912,149	1,062,548	1,062,548	-	416,962,583	1,327,290	100%	0.25%	520,852,000	1,327,290	3.089573	4,100,759	4,100,000	6,733,000	10,833,000	2,264,000	13,097,000	
		Kalasin	1,037,627	1,037,627	-	1,037,627	416,962,583	1,296,160	0.00%	0.25%	520,852,000	-	3.089573	-	-	6,733,000	6,733,000	2,264,000	8,997,000	
		Tumbang Topus	440,029	440,029	440,029	-	416,962,583	549,666	100%	0.11%	520,852,000	549,666	3.089573	1,698,232	1,730,000	6,733,000	8,463,000	2,270,000	10,733,000	
		Tumbang Olong II	3,366,794	2,952,994	184,800	2,768,194	416,962,583	3,688,755	6.26%	0.71%	520,852,000	230,844	3.089573	713,210	713,000	6,733,000	7,446,000	2,264,000	9,710,000	
<b>TOTAL</b>			<b>416,962,583</b>	<b>134,958,008</b>	<b>285,573,375</b>		<b>520,852,000</b>		<b>1</b>		<b>168,583,828</b>		<b>520,852,000</b>	<b>520,852,000</b>	<b>781,028,000</b>	<b>1,301,880,000</b>	<b>262,630,000</b>	<b>1,564,510,000</b>		

Total Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah	1,564,510,000
Pagu Bagi Hasil Pajak 2021	1,301,880,000
Hasil hitungan BHP 2021	1,301,880,000
Pagu Bagi Hasil Retribusi 2021	262,630,000
Bagi Hasil Retribusi per Desa 2021	2,264,000
60% dari BHP	781,028,000
Final BHP 60% PER DESA	6,733,000
40% dari BHP	520,852,000
jumlah desa	116
INDEX	3.089572743

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA

(.....)

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA

(.....)

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MURUNG RAYA

(.....)

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**

**SALINAN**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 55 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN  
PENYALURAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021.**

**Format Peraturan Kepala Desa tentang Perhitungan Final Tunjangan Aparatur Desa Bersumber Dari Dana Bagian Hasil Pajak.**



**KEPALA DESA ..... (Nama Desa)  
KABUPATEN MURUNG RAYA**

**PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN 202X  
TENTANG  
PERHITUNGAN FINAL TUNJANGAN APARATUR DESA  
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL  
TAHUN ANGGARAN 202X  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA... (Nama Desa),**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor..... Tahun ..... tentang Tentang Pedoman Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 202x, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Perhitungan Final Tunjangan Aparatur Desa Bersumber Dari Dana Bagian Hasil (Nama Desa) Tahun Anggaran 202x;

**Mengingat** : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....dan seterusnya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERHITUNGAN FINAL TUNJANGAN APARATUR DESA BERSUMBER DARI DANA BAGIAN HASIL TAHUN ANGGARAN 202X (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 202x**

**Pasal 1**

Pendapatan Desa bersumber dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp. XX.XXX.XXX,-

(X Puluh X Juta X Ratus X Puluh X Ribu X Ratus X Puluh X Rupiah).



**Pasal 2**

Nilai Awal Persentase Tunjangan seluruh Aparatur desa pertahun adalah 35% yaitu Rp. X.XXX.XXX,- (X Juta X Ratus X Puluh X Ribu X Ratus X Puluh X Rupiah)

**Pasal 3**

Tunjangan per orang perbulan untuk aparatur desa adalah Rp. XXX.000,- (X Ratus X Puluh X Ribu Rupiah)

**Pasal 4**

Tunjangan kepala Desa perbulan yaitu Tunjangan per orang perbulan ditambah Rp. 5.000,- sebesar Rp. XXX.000,- (X Ratus X Puluh X Ribu Rupiah)

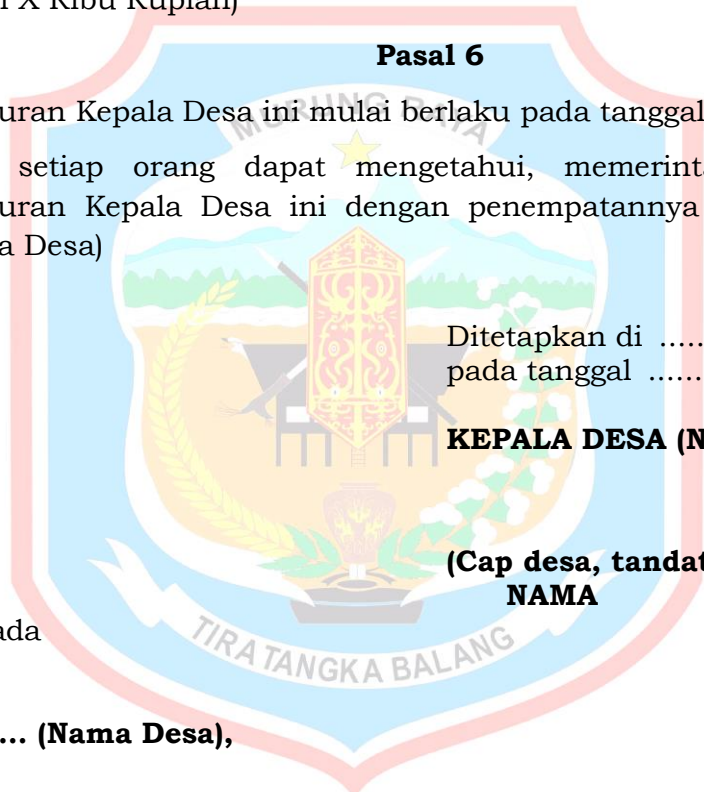
**Pasal 5**

Tunjangan Sekretaris desa termasuk Kasi dan Kaur yaitu Tunjangan per orang perbulan ditambah Rp. 1.000,- sebesar Rp. XXX.000,- (X Ratus X Puluh X Ribu Rupiah)

**Pasal 6**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)



Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

**KEPALA DESA (Nama Desa)**

**(Cap desa, tandatangan)  
NAMA**

Diundangkan di ... pada  
tanggal ...

**SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),**

**(tanda tangan)**

**NAMA**

**BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE M. YOSEPH**